



NASIONALISME: ARTI DAN PERKEMBANGANNYA

NATIONALISM: ITS MEANING AND DEVELOPMENT

Putri Rizqiyatul Fadilah¹, Muhammad Mutasimillah², Maftuh Ajmain³

Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: prizqiyatul@gmail.com, Mutasimillah830@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 11-03-2025

Revised : 13-03-2025

Accepted : 15-03-2025

Published : 17-03-2025

Abstract

Nationalism is a concept related to identity, loyalty, and pride in a nation. This article discusses the meaning of nationalism from various perspectives as well as its historical development over time. Although nationalism initially emerged as a political movement that emphasized national sovereignty and unity, it has evolved in tandem with social, political, and economic dynamics around the world. The progress of nationalism is also influenced by the advancement of information technology, revolution, colonialism, and globalization. Modern nationalism encompasses many things beyond state sovereignty; It also includes cultural identity, social solidarity, and the difficulty of maintaining unity in the midst of differences. The purpose of this article is to improve our understanding of the meaning of nationalism and how it affects modern society.

Keywords: *nationalism, identity, History,, development*

Abstrak

Nasionalisme merupakan konsep yang berkaitan dengan identitas, loyalitas, dan kebanggaan terhadap suatu bangsa. Artikel ini membahas arti nasionalisme dari berbagai perspektif serta perkembangan historisnya dari masa ke masa. Meskipun nasionalisme awalnya muncul sebagai gerakan politik yang menekankan kedaulatan dan persatuan nasional, itu telah berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi di seluruh dunia. Kemajuan nasionalisme juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi, revolusi, kolonialisme, dan globalisasi. Nasionalisme modern mencakup banyak hal selain kedaulatan negara; itu juga mencakup identitas budaya, solidaritas sosial, dan kesulitan mempertahankan kesatuan di tengah perbedaan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang arti nasionalisme dan bagaimana hal itu memengaruhi masyarakat modern.

Kata Kunci: *nasionalisme, identitas, Sejarah, perkembangan*

PENDAHULUAN

Nasionalisme dalam konteks sejarah kontemporer Indonesia tampaknya dimaknai sebagai kepercayaan dan tindakan politik untuk mengubah secara radikal status Indonesia sebagai bangsa terjajah agar menjadi bangsa merdeka. Dalam kalimat lain, nasionalisme Indonesia bertujuan untuk meruntuhkan sistem kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk apa pun dan dari mana pun asalnya. Alinea pertama UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 menegaskan rumusan kepercayaan dan tindakan itu sebagai berikut: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Presiden Soekarno pernah mengatakan "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah," kata Presiden Soekarno. Menurut pendapat ini, sejarah memiliki banyak manfaat untuk kehidupan.



Seorang filsuf Yunani bernama Cicero (106-43 SM) mengatakan "Historia Vitae Magistra", yang berarti "sejarah memberikan kearifan" dalam arti yang lebih umum, "sejarah adalah guru kehidupan". Djoko Santoso, tahun 2012. Berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno dan para pahlawan lainnya, menunjukkan semangat mereka untuk keluar dari belenggu penjajah yang telah dialami rakyat Indonesia selama bertahun-tahun (Asril, dkk., 2023).

Ini adalah sejarah dari orang-orang yang harus kita bayar dengan perjuangan juga, dalam arti kita sebagai untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, memajukan bangsa Indonesia, dan mewujudkan semangat Indonesia, generasi berikutnya memiliki tanggung jawab besar. Karena sejarah menunjukkan bahwa setiap negara membutuhkan ide dan impian. Bangsa itu berada dalam bahaya jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita mereka menjadi kabur dan usang.

Akan tetapi, kualitas pendidikan di berbagai institusi pendidikan saat ini menurun. Ini terjadi pada siswa dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Keyakinan mahasiswa bahwa mereka adalah intelektual kritis saat ini semakin jauh dan semakin merosot. Namun, penyelenggaraan pendidikan Pancasila di universitas sangat penting karena universitas peran sebagai penggerak perubahan yang menghasilkan sarjana-sarjana muda yang akan berkembang menjadi pusat pembangunan dan penerus kepemimpinan nasional di berbagai tingkat lembaga negara, daerah, lembaga infrastruktur politik dan sosial kemasyarakatan, lembaga bisnis, dan lainnya.

METODE PENELITIAN

Untuk mendukung penelitian ini, berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian diperiksa, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel. Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, proses analisis dilakukan dengan membaca, memahami, dan menginterpretasikan isi dari berbagai literatur. Metode ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan menyusun sintesis ide-ide yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya untuk mencapai kesimpulan yang sistematis dan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Nasionalisme

Sarman (1995) meninjau perspektif nasionalisme yang sederhana yang dimiliki sebagian besar orang. Sebagai simbol patriotisme, katanya, nasionalisme sering didefinisikan sebagai kecintaan terhadap tanah air yang tanpa reserve. heroik semata-mata sebagai jenis perjuangan yang seolah-olah menghalalkan segalanya demi negara yang dicintai. Definisi tersebut membuat makna nasionalisme menjadi kuno dan tidak relevan dengan masalah kontemporer tentang penjajahan dan kemerdekaan.

Nasionalisme mencakup konteks yang lebih luas, yaitu perasaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan budaya yang tinggal di suatu bangsa (Hara, 2000). Dalam konteks ini Nasionalisme juga menggunakan kebanggaan untuk menunjukkan identitasnya sebagai bangsa; itu sendiri adalah proses yang dipelajari dan bukanlah warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi (Anggraeni Kusumawardani dan Faturochman, 2004).



Menurut keyakinan yang dikenal sebagai patriotisme, seseorang harus memberikan kesetiaan tertingginya kepada negara asalnya. Rasa kebangsaan adalah perasaan yang mendalam tentang hubungan yang kuat dengan tanah airnya (Hans Kohn: 1961). Nasionalisme terdiri dari 2 macam:

- a. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu rasa nasionalisme yang berlebihan yang menganggap negara sebagai bagian dari diri mereka sendiri lebih unggul (lebih penting) daripada bangsa lain.
- b. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu konsep kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi seseorang terhadap bangsanya dan tanah airnya, percaya bahwa bangsanya adalah bagian dari bangsa lain di dunia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1997), "nasionalisme" didefinisikan sebagai tingkat kesadaran kolektif yang dibangun oleh masyarakat. Keanggotaan dalam suatu bangsa yang bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan semangat kebangsaan, identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu identitas yang dimiliki sebagai ikatan bersama dalam satu kelompok.

Salah satu definisi paling umum dari patriotisme adalah kecintaan terhadap keadaan negara yang berdaulat di wilayah tertentu. Nasionalisme adalah doktrin politik yang menempatkan bangsa sebagai pilar utama dalam struktur politik bersama dengan banyak tujuan dan cita-cita yang berbeda. Oleh karena itu, identitas nasional dimiliki oleh bangsa yang memiliki nasionalisme dan berfungsi untuk menyatukan bangsanya (Kalidjernih: 2010).

2. Fungsi Nasionalisme.

Menurut Crano (dalam De Dreu & De Vries, 2001), nasionalisme berfungsi untuk memberikan identitas sosial pada diri seseorang, yaitu apakah ia termasuk bagian suatu kelompok. Keanggotaan tersebut akan melahirkan suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh para anggota kelompok tersebut. Salah satu konsekuensinya yakni para anggota kelompok berupaya secara aktif mempertahankan keutuhan kelompok dari ancaman yang datang dari luar. Crano menambahkan, nasionalisme sebagai suatu identitas sosial tidak berarti sebagai suatu upaya penyeragaman para anggotanya. Setiap anggota dibebaskan memilih posisi dan perannya sendiri, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dan tidak membahayakan keutuhan kelompok.

Identitas sosial merupakan suatu pengetahuan individu yang dimilikinya terhadap kelompok-kelompok sosial tertentu bersama dengan keseluruhan perasaan dan nilai-nilai yang signifikan dengan keanggotaannya pada kelompok-kelompok sosial tersebut. Kelompok sosial terdiri atas dua atau lebih individu yang saling berbagi identifikasi sosial umum dari diri masing-masing, atau yang memiliki kemiripan tertentu dan merasa sebagai bagian dari kategori sosial yang sama. Individu akan senantiasa memelihara citra diri yang positif dengan mengikatkan diri ke dalam kelompoknya, agar dirinya dapat di pandang secara positif dalam kelompok tersebut (Feather, 1994). Maka setiap warga negara Indonesia, harus senantiasa menjaga



keutuhan negara Indonesia dan berupaya memelihara citra diri yang dimilikinya dengan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia.

Menurut Kartodirjo (1993) identitas sosial baru sebagai bangsa Indonesia merupakan kesadaran kolektif yang dimaksudkan untuk menggantikan "identitas negatif" yang diberikan kolonialis. Sebutan *inlander* pada masa kolonial mendorong kesadaran sejumlah orang yang terpelajar untuk berontak terhadap keadaan dan membentuk identitas sosial yang baru. Tujuannya untuk menentukan kedudukan kelompok dalam sistem masyarakat, serta menyadari batas-batas kedudukan golongan lain terhadap kelompok tersebut.

Rumusan nasionalisme Indonesia khas dan berbeda dengan nasionalisme bangsa lain, karena tujuan nasionalisme secara umum adalah memberikan label identitas terhadap suatu bangsa. Meskipun dimungkinkan ada kesamaan antara konsep suatu bangsa dengan bangsa lain, namun karena dasar setiap negara berbeda maka tiap negara akan memiliki konsep berbangsa yang unik atau khas (Martaniah, 1990).

Karakteristik dari nasionalisme yang dimiliki seseorang digambarkan oleh beberapa ahli dengan menunjukkan sikap-sikap tertentu yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Kodiran (dalam Martaniah, 1990) menyebutkan bahwa hasrat-hasrat untuk berprestasi, berencana, bertanggung jawab, keterbukaan, kemandirian, kehormatan, rasionalitas dan keadilan merupakan sendi-sendi utama dalam kualitas berbangsa dan bernegara seorang warga negara (Kartodirjo, S., 1993).

3. Bangkitnya Nasionalisme di Indonesia

Menurut Kartodirjo, identitas nasional diberikan kepada setiap warga negara ketika sebuah negara dibentuk. Identitas primordial tetap ada, tetapi identitas ini "melampauinya" (mentransendensi) (Kartodirdjo: 2010). Bangkitnya Nasionalisme di Indonesia Berbeda dengan munculnya nasionalisme di Eropa, nasionalisme khususnya di Indonesia berhubungan dengan kolonialisme Belanda yang berkuasa di Indonesia selama berabad-abad. Menurut Abdulgani (1964: 16), "Nasionalisme Indonesia sebagai reaksi terhadap kolonialisme", tujuan kebangkitan Indonesia adalah untuk menenyapkan kekuasaan penjajah.

Verdom (1990) menyatakan bahwa "nasionalisme adalah perasaan menjadi anggota masyarakat besar yaitu bangsa Indonesia, tetapi syarat mutlak untuk mencapai maksud itu ialah dengan menenyapkan segala bentuk kekuasaan penjajah dan mencapai suatu keadaan yang memberi tempat untuk perkembangan merdeka bangsa Indonesia", menurut Kansil (1984: 14). Ada beberapa individu yang berpendapat bahwa nasionalisme lebih merupakan masalah sosiopsikologis daripada politik. Menurut Kartodirdjo (1998: 29), tujuan teknologi sosial adalah untuk mendorong integrasi. Oleh karena itu, sebagai bagian dari nasionalisme, seseorang harus setia atau menyerahkan diri kepada masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya (Darwin Une, 2010).

Bangkitnya nasionalisme di Indonesia telah dimulai pada awal abad ke-20 yang juga merupakan awal terbentuknya wawasan baru, wawasan ini muncul dari elit-elit intelektual. Awal pergerakan dikatakan sebagai permulaan pergerakan nasional yang dimulai dengan



terbukanya suatu pandangan atau wawasan kebangsaan di kalangan kaum elit intelektual. Konsep wawasan kebangsaan dikaitkan pula dengan kolonialisme/imperialisme pada masa pergerakan nasional yang menyebabkan kemiskinan, kebodohan dan penderitaan di kalangan rakyat. Lebih lanjut Suyatno mengatakan, bahwa prestasi nasional pada masa pergerakan nasional dihasilkan dari kesatuan politik kaum intelegensia. Mereka adalah elit modern Indonesia karena pendidikan mereka didasarkan pada sistem pendidikan Eropa modern (Kartodirdjo 2003: 10 dalam Une 2010).

Munculnya berbagai elit-elit intelektual dengan berpendidikan barat ini yang menjadi pengungkit atau pendorong lahirnya kesadaran berbangsa di kalangan rakyat pribumi yang mana hal ini terjadi pada awal abad XX. Mulai dari awal Budi Utomo pada tahun 1908 hingga organisasi-organisasi yang muncul setelahnya, berbagai organisasi dibentuk dan dijalankan untuk merealisasikan nasionalisme. Semua organisasi ini selalu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengangkat martabat dan harkat rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan kemelaratan yang disebabkan oleh penjajahan bangsa Eropa (Afandi, dkk., 2023).

Dalam perkembangannya nasionalisme dapat dikonseptualisasikan dalam sebuah Manifesto Politik oleh Perhimpunan Indonesia yang isinya antara lain:

- a. Rakyat Indonesia perlu diperintah oleh Pemerintah yang dipilih sendiri.
- b. Dalam memperjuangkan tujuan itu rakyat Indonesia tidak mengharapkan bantuan pihak lain, kesemuanya harus berdasarkan kekuatan sendiri.
- c. Untuk mensukseskan perjuangan itu, maka mereka yaitu rakyat harus Bersatu.

Dalam Manifesto tersebut pertama kali dijumpai konsep bangsa Indonesia, konsep negara nasion, sekaligus identitas nasional. Konsep ini semakin lengkap dan bulat dengan adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Secara implisit Manifesto tersebut memuat paham nasionalisme sebagai anti kolonialisme dan prinsip-prinsip: (1) kesatuan (*unity*), (2) kebebasan (*liberty*), (3) persamaan (*equality*), (4) kepribadian (*personalism*), dan (5) hasil usaha (*performance*).

Nasionalisme dapat dikonseptualisasikan sebagai fakta sosiopsychologis. Dalam tindakan golongan, ada tiga komponen yang berbeda. Yang pertama adalah aspek kognitif, yang kedua adalah aspek orientasi tujuan atau nilai, dan yang ketiga adalah aspek emosi. Menurut pendapat Levy, yang dikemukakan oleh Katordirdjo (1967: 43) bahwa ketika ketiga aspek tersebut diuraikan lebih jauh, fenomena sosial yang mendorong kemajuan suatu bangsa akan jelas:

a. Aspek Kognitif.

Semua tindakan manusia memiliki beberapa komponen pengenalan yang memungkinkan seseorang mengubah atau mewujudkan keadaan yang mereka alami. Untuk memahami keadaan sosial di masyarakat kolonial, kita harus kembali ke masa sebelum Pergerakan Nasional. Pergerakan emansipasi sejak akhir abad ke-19 adalah manifestasi dari kesadaran yang meningkat sebagai akibat dari kondisi sosial. Dengan tulisan-tulisannya, Raden A. Kartini, seorang pelopor emansipasi wanita, telah



menunjukkan tanda-tanda perubahan jaman seperti yang dialami bangsa Indonesia pada masa itu.

Setelah Kartini memelopori gerakan emansipasi, dorongan ke arah kemajuan bertambah pesat, terutama dalam bidang pendidikan semakin terlihat kegiatan-kegiatannya. Salah satu inti pendukung cita-cita emansipasi dalam bidang itu adalah golongan mahasiswa dari sekolah Dokter Jawa yang mencetuskan cita-cita organisasi sebagai bentuk konkrit dari solidaritas golongan. Budi Utomo sebagai organisasi pertama adalah hasil ciptaan golongan tersebut. Hadirnya golongan asing yang memiliki kebudayaannya sendiri menimbulkan kesadaran akan perbedaan-perbedaan yang makin lama makin terasa karena diskriminasi di semua bidang-bidang kehidupan.

Dengan diskriminasi-diskriminasi ini, orang menjadi sadar bahwa negara ini tidak memiliki hak yang dijamin. Rakyat Indonesia belajar bahwa mereka dikuasai oleh kolonial ketika mereka tinggal di Indonesia. Kemudian muncul keinginan untuk maju, kebutuhan akan pendidikan, dan kesadaran untuk bekerja sama untuk perbaikan pada saat-saat penting dalam Pergerakan Nasional. Akibat kesadaran ini, Budi Utomo disambut dengan ungkapan "Si manis telah bangun" saat dia berdiri (Kartodirdjo 1967: 45).

b. Aspek Goal Orientation.

Fokus pada konsep teologis Pergerakan Nasional, yang ditunjukkan sebagai tujuan dan dasar tindakan organisasi nasional, terkait erat dengan aspek orientasi tujuan. Tujuan Pergerakan Nasional berkembang dari masalah sosial budaya ke masalah politik karena nasionalisme berfokus pada kebebasan dan kesatuan nasional.

Pada tahun 1927, Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) dibentuk untuk menunjukkan kesatuan politik Pergerakan Nasional. PPPKI dibentuk sebagai pemusatan organisasi-organisasi nasional dengan tujuan kemerdekaan politik dan ekonomi. Kongres Indonesia Raya 1937 dan Gapi 1939 kemudian menjadi inspirasi untuk kesatuan berikutnya. Ambisi politik pertama kali diungkapkan pada 28 Oktober 1928, yang kemudian dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda, dengan slogan "Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa" (Pringgodigdo 1984: 46).

c. Aspek Affective.

Aspek afektif: Bersama-sama dengan berbagai bentuk kesadaran nasional dan budaya tentang situasi kolonial, Indonesia masih dapat menunjukkan reaksi psikologis sebagai akibat dari kondisi sosial yang ada di dalam masyarakat kolonial. Namun, reaksi ini tidak langsung berkaitan dengan kecerdasan, perasaan rendah diri, takut, benci, kebutuhan akan keamanan, perlindungan, dan perasaan keluarga. Faktor-faktor emosi ini menjadi semangat yang mendorong Pergerakan Nasional. Menurut Kartodirdjo (1967: 48) yang dimaksud dengan faktor affective adalah tanggapan emosional, yang biasanya ditunjukkan dengan simpati, antipati, benci, takut, marah, sayang, dan sebagainya.

Mungkin ada perbedaan pendapat antara para ahli di atas, tetapi tujuan kebangkitan nasional (nasionalisme) Indonesia—cita-cita untuk kemerdekaan—tetap sama. Nasionalisme Indonesia berdasarkan tiga prinsip: kemerdekaan (kebebasan), kesatuan, dan



kesamaan (Kartodirdjo, Sartono. 1967).

4. Nasionalisme dalam Perspektif Lokal.

Republik ini lahir dari perjuangan semua rakyat Indonesia, yang menumbuhkan rasa persatuan nasional dan rasa memiliki secara bersama. Meskipun demikian, setelah pemerintahan orde baru runtuh, euphoria muncul dalam bentuk yang dapat mengancam persatuan nasional. Kemudian muncul konflik horizontal, atau konflik lokal, seperti berbagai jenis kekerasan dan radikalisme atas nama agama, serta bom bunuh diri atas nama agama.

Sepertinya nasionalisme telah dihilangkan dan diganti dengan semangat kelompok. Partisi politik yang sangat populer, termasuk yang menganut ideologi Pancasila, telah kehilangan semangat persatuan nasional dan bahkan roh Pancasila. Semangat Sumpah Pemuda dihapus dan Trisakti disimpan. Seolah-olah masing-masing kelompok merasa bahwa yang namanya Indonesia hanyalah milik kelompok saja. Semua berangkat membuat rel dan jalannya sendiri-sendiri untuk mewujudkan cita-citanya dengan terus mengibar-ngibarkan bendera primordialisme (Azra, Azyumardi, 1999).

Priomordialisme ditampilkan sehingga politik yang muncul bukanlah politik untuk persatuan nasional, tetapi politik untuk aliran. Banyak partai yang didirikan oleh kelompok tertentu tidak lagi berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjadi bagian dari kekuatan nasional dan membantu membangun persatuan bangsa; sebaliknya, mereka hanya berfungsi sebagai alat untuk mencari kedudukan atau menyebarkan kekecewaan. Demikian pula dengan aktivitas keagamaan yang terjadi di dalam masyarakat. Karena merasa terpinggirkan, muncul kelompok eksklusivisme yang berperilaku dan bertindak secara radikal. Di sisi lain, agama yang bersih, yang suci dan selalu mengajarkan kemuliaan, digunakan untuk mendukung kepentingan dan keinginan kelompok tertentu. Agama, yang seharusnya dimasukkan ke dalam bidang pendidikan moral untuk membina pikiran spiritual umat, malah digunakan untuk mendukung gerakan radikal yang merugikan Masyarakat lainnya (Fukuyama, Francis. 2004).

Semua orang berbicara tentang demokrasi, dan itu indah, kata Hutasoit sebagaimana (dalam, Sasongko, 2005: 24). Namun, ketika demokrasi diterapkan, ia gagal menghasilkan nasionalisme yang kuat karena selalu terlibat dengan masalah kepentingan kelompok. Namun, menurut pakar ekonomi dan sejarah Hongaria Ivan T. Berent, runtuhnya dominasi rezim komunisme global yang radikal dan otoriter, yang dimulai dengan runtuhnya Uni Soviet, akan diikuti oleh bangkitnya gerakan kelompok keagamaan yang radikal dan otoriter. Sebaliknya, gerakan-gerakan yang berbasis nasionalisme menjadi lebih terfokus pada pembangunan negara bangsa daripada sosionasionalisme.

Berbagai gerakan dan sentimen kedaerahan yang muncul pada tahun 1900-an, termasuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Papua Merdeka di Irian Jaya, Gerakan Sulawesi atau Makasar Merdeka di Sulawesi Selatan, dan Federasi Kalimantan Timur, muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap proses pembangunan fisik. Selama masa kepemimpinan Orde Baru, ada ketidakpuasan sosial, budaya, dan ekonomi. Ketidakpuasan ini memicu kesadaran atau sentimen kedaerahan yang kuat, yang dilampiaskan oleh gerakan radikalisme di beberapa wilayah yang menuntut keluar dari negara Kesatuan Republik Indonesia (J.A. Denny, 2002).



Nasionalisme kontemporer sangat berbeda dari nasionalisme awal. Nasionalisme pertama kali muncul sebagai perasaan dan kesadaran akan harga diri dari ketertinggalan, kebodohan, dan kemiskinan yang disebabkan oleh penindasan ideologi kolonialisme Belanda. Kemudian, nasionalisme berkembang menjadi perasaan dan kesadaran akan harga diri daerah yang merasa dieksploitasi oleh pemerintah pusat, dan kebijakan pembangunan lebih difokuskan pada orang Jawa (Jawasentris) daripada orang di luar Jawa.

Tidak ada keadilan dan ketidakseimbangan dalam cara pemerintahan di Jawa dan di luar Jawa. Bahkan perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa nasionalisme pada masa pergerakan nasional awalnya lebih berfokus pada mempertahankan keutuhan bangsa (bersifat integratif), sedangkan nasionalisme saat ini lebih berfokus pada mengancam keutuhan dan persatuan bangsa. Ini menunjukkan bahwa nasionalisme telah berkembang dari global ke lokal dan dari integrasi ke fragmentasi.

KESIMPULAN

Nasionalisme adalah perekat bangsa, bermakna cinta tanah air dan persatuan. Sejarahnya lahir dari perlawanan terhadap penjajah, diperkuat oleh para intelektual dan organisasi pergerakan. Kini, nasionalisme menghadapi tantangan disintegrasi akibat primordialisme dan kedaerahan. Pendidikan Pancasila penting untuk menjaga nasionalisme inklusif demi keutuhan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi dkk, "Nasionalisme di Indonesia", Nusantara Hasana Journal, Vol. 3 No. 1 (Juni 2023), 79.
- Anggraeni K dan Faturochman, "Nasionalisme", Buletin Psikologi, Vol.12 No. 2 (Desember, 2004), 63.
- Asril dkk, "Peningkatan Nilai-nilai Demokrasi Indonesia dan Nasionalisme Pada Mahasiswa melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Vol. 8 No. 3, (2023)
- Azra, Azyumardi. 1999. Nasionalisme, Etnisitas dan Islam Dalam Politik Kontemporer (Makalah Seminar nasional Sejarah Prog. Studi Ilmu Sejarah UNS).
- Darwin Une, "Perkembangan Nasionalisme di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah", Jurnal Inovasi, Vol. 7 No. 1 (Maret 2010), 180.
- Fukuyama, Francis. 2004. The End Of History and The Last Man (Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal). Yogyakarta C.V Qalam
- J.A., Denny.2002 Nasionalisme Dulu Hingga Era Reformasi. (Kompas edisi 24 Maret).
- Kartodirdjo, Sartono. 1967. Kolonialisme dan Nasionalisme Indonesia Abad XIX – XX. Yogyakarta : Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fak. Sastra UGM
- Kartodirdjo, S. (1993). Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional. Yogyakarta: Aditya Media.
- UUD 1945 alinea pertama dari pembukaan